

DAFTAR PUSTAKA

- Aprianti, Y. (2014). *Prosedur Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor Pertahunan*. Program Diploma III Keuangan dan Perbankan. Sekolah tinggi Ilmu Ekonomi Kesatuan. Bogor.
- Arianty, F. (2022). Analisis Perubahan Tarif Progresif Pajak Penghasilan Orang Pribadi Dalam Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan Ditinjau Dari Azas Keadian. *J. Administrasi Bisnis Teraa (JABT)*. 5 (1): 1-14.
- Asril. J. (2018). *Prosedur Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor Dengan Sistem Samsat Anywhere Pada Kantor Unit Pelayanan Teknis Daerah Pengelolaan Pendapatan Daerah (UPTD PPD) Samsat Kota Pariaman*. Tugas Akhir. Program Studi Kesekretariatan. Program Diploma III. Fakultas Ekonomi Universitas Andalas. Padang.
- Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Barat. *Samsat UPTD*. Tersedia di https://bapenda.sumbarprov.go.id/content/samsat/samsat_uptd. [Diakses 8 Maret 2023].
- Badan Pendapatan Daerah. (2022). *Surat Pemberlakuan Peraturan Gubernur No 38 Tahun 2022*. Nomor: 973/1447/Pjk-Bapenda-2022. [Diakses pada 25 Maret 2023].
- Ibnu. (2020). *PPh Final Dan Tidak Final: Pengertian Lengkap dan Perbedaannya*. Tersedia di <https://accurate.id/ekonomi-keuangan/pph-final-dan-tidak-final-pengertian-lengkap-dan-perbedaannya/>. [Diakses 26 Maret 2023].
- Implementasi Kebijakan Sistem Pemungutan Pajak Self Assessment. *Jurnal Kebijakan Pemerintahan*. (n.d.). Retrieved October 23, 2022, from <https://ejournal.ipdn.ac.id/JKP/article/view/1094>.
- Mardiasmo. (2016). *Perpajakan Edisi Revisi Tahun 2016*. Yogyakarta: Penerbit. Andi.
- Mardiasmo. (2018). *Perpajakan Edisi Terbaru 2018*. Yogyakarta: Penerbit. Andi.
- Online Pajak. (2018). *UU No 36 Tahun 2008: Perubahan Penting Peraturan Pajak Penghasilan*. Tersedia di <https://www.online-pajak.com/tentang-pajak/uu-no-36-tahun-2008>. [Diakses 2 April 2023].
- Pengaruh Pengetahuan Wajib Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Pajak Kendaraan Bermotor, Dan Sistem Samsat Drive Thru Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor. *Jurnal Akuntansi*. (n.d.). Retrieved October 23, 2022, from <https://jurnalfe.ustjogja.ac.id/index.php/akuntansi/article/view/253>
- PPID Provinsi Sumatera Barat. (2021). *Peraturan Gubernur Nomor 88 Tahun 2020 : UPTD Badan Pendapatan Daerah*. Tersedia di <https://ppid.sumbarprov.go.id>. [Diakses 2 April 2023].

Prakosa, P. B., dan A. Hidayatulloh. (2019). Analisis Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018: Sudut Pandang Pelaku UMKM. *J. Akuntansi dan Pajak*. 20(01): 99-108.

Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pemerintahan Daerah.

Suastika, I. N. (2021). Tata Cara Pemungutan Pajak Dalam Perpektif Hukum Pajak. *J. Komunikasi Hukum*. 7(1): 326-335.

Tarif PPN 2022: Objek, Dasar Hukum, Dan Cara Menghitungnya. (2022). Tersedia di <https://msmconsulting.co.id/news/43/tarif-ppn-2022-objek-dasar-hukum-dan-cara-menghitungnya>. [Diakses 20 Maret 2023].

Utina, N., dan Gobel, L. van. (2019). Proses Pelayanan Pengurusan Pajak Kendaraan Bermotor Di Kantor Samsat Kabupaten Bone Bolango. *Publik: Jurnal Manajemen Sumber Daya Manusia, Administrasi Dan Pelayanan Publik*, 6(1), 23–33. <https://doi.org/10.37606/PUBLIK.V6I1.21>.

Wahono, S. (2012). *Mengurus Pajak Itu Mudah*. PT. Elex Media Komputindo: Jakarta.

